

## **Membangun Sinergi PT dan Dunia Usaha** Oleh DADANG S. ANSHORI

TUGAS perguruan tinggi (PT) dalam konteks saat ini tidak sebatas menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Tri Dharma PT. Tugas ini baru menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga yang terpisah dari realitas masyarakat (menara gading), karena kerap kali Tri Dharma ini baru diwujudkan secara eksklusif. Ilmu pengetahuan pun masih merupakan dimensi yang terpisah dari realitas sosial yang hendak dibangunnya. Paradigma ilmu atau aksiologi ilmu seringkali porak-poranda ketika dihadapkan pada kenyataan-kenyataan sesungguhnya dalam masyarakat. Teori ekonomi misalnya dianggap mati suri ketika Indonesia diterpa krisis moneter berkepanjangan. Demikian pula ilmu politik yang oleh sebagian pihak dianggap tidak diperlukan karena politik Indonesia tidak bisa dipetakan berdasarkan teori-teori politik yang ada. Pun ilmu pendidikan tidak bisa berkitik dihadapan dekadensi moral generasi muda yang kian menggila.

Contoh tersebut barangkali hanya menegaskan bahwa pada tingkat aksiologi, ilmu pengetahuan harus dirumuskan agar membumi dan benar-benar menjadi alternatif solusi bagi masyarakat. Dari pemahaman ilmu yang membumi inilah, kaum akademisi melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai tolok ukur keberadaan institusi pendidikan di tengah masyarakat. Namun, kerap kali pengabdian ini pun masih dipahami sebatas pembelajaran pihak perguruan tinggi kepada masyarakat sehingga pengabdian menjadi acara seremonial yang tidak pernah dikecap oleh masyarakat luas.

Tugas PT yang tak kalah penting dalam konteks saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan keberadaan PT dengan dunia usaha dan industri (DUDI) sehingga para alumni PT tersebut mendapatkan tempat dalam pormasi lapangan kerja yang ada. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu mengurangi beban pemerintah terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja. Dengan kata lain dharma perguruan tinggi keempat adalah membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan industri.

### **Reorientasi pendidikan**

Strategi yang mesti dilakukan PT untuk dapat melaksanakan dharma keempat adalah dengan merumuskan kurikulum yang tidak hanya membuat sejumlah kompetensi kognitif para mahasiswa, melainkan juga harus mampu menyentuh psikomotorik dengan berbasis kompetensi. Kompetensi inilah yang diharapkan dapat membekali alumninya dalam menghadapi persaingan kerja. Pandangan sejenis ini pernah dilontarkan oleh mantan Mendikbud, Wardiman Djojonegoro (2003), dengan menyebut bahwa kecenderungan ke depan pendidikan Indonesia harus didasarkan pada *demand mainded*. Dalam menghadapi jumlah pengangguran yang nyaris mencapai angka 40 juta, menurut Wardiman, lembaga pendidikan harus melakukan perubahan paradigma (*mindset*), yakni perubahan dari wawasan memproduksi (*suply minded*) ke wawasan *demand mainded*, yang berarti pendidikan didasarkan pada kebutuhan dan permintaan pihak luar; perubahan dari wawasan memberi izajah (*certificate minded*) ke wawasan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan (*competence and knowledge mainded*); perubahan dari

sistem pendidikan yang kaku ke sistem pendidikan yang lentur/luwes, dan perubahan dari sekolah yang berdiri sendiri menjadi sekolah yang berintegrasi dengan dunia luar.

Kurikulum pada hakikatnya hanyalah rumusan tertulis dari sebuah rencana kegiatan pendidikan. Paradigma di atas harus diwujudkan dalam berbagai realisasi konkret, misalnya harus semakin dekatnya kemampuan mahasiswa dengan kebutuhan industri, terjadinya kerjasama antara PT dengan industri dalam pola yang mutualis. Bagaimana pun kemampuan PT akan fasilitas praktikum sangat terbatas dan akan terus tertinggal mengingat kemampuan finansial perguruan tinggi. Melalui kerjasama mutualis inilah diharapkan ketertinggalan PT terhadap akses teknologi baru bisa diatasi.

Di samping itu, perubahan pola pikir untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya harus dihindari, karena program pendidikan ke depan tidak lagi mengutamakan kuantitas melainkan kualitas. Persoalannya, jumlah mahasiswa yang banyak ini sering dijadikan solusi untuk mendapatkan dana masyarakat karena bantuan pendidikan dari pemerintah tidak memadai. Di lain pihak, penyelenggara pendidikan (PT) tidak bisa menyerahkan beban pendidikan kepada orang tua karena keterbatasan kemampuan masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Oleh karena itu, pandangan yang realistis terhadap masa depan para mahasiswa (bekerja) harus menjadi salah satu acuan dalam menyelenggarakan pendidikan, sekalipun bukan berarti pendidikan diabdikan kepada kehidupan kapital semata, karena pendidikan juga mengandung nilai-nilai humanis.

Kerjasama PT dengan dunia usaha tidak bisa diselenggarakan secara partial dan instan. Kerjasama harus dilakukan melalui pola yang integratif dan terus-menerus (kontinu). Oleh karena konsep pendidikan berbasis masyarakat (*education based society*) harus direfleksikan dengan keterlibatan potensi-potensi masyarakat yang berada di lingkungan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama mencari solusi dan menjadi bagian dari persoalan pendidikan. Keuntungan yang selalu dipertanyakan dunia usaha dan industri atas masuknya lembaga pendidikan harus dijawab secara konkret oleh lembaga pendidikan, misalnya dengan semakin meningkatkan produktivitas industri tersebut. Demikian pula, pihak industri bisa mendapatkan tenaga kerja murah walaupun dalam hal kemampuan tidak setaraf pekerja tetap industri tersebut. Pola-pola mutual inilah yang harus terus dibangun agar membengkaknya jumlah pengangguran dapat diatasi sedikit-demi sedikit.

### **Lembaga model**

Untuk dapat melakukan kerjasama secara integratif dan kontinu, PT harus memiliki sayap lembaga yang secara khusus mengurus masalah-masalah alumni ini. Lembaga tersebut bisa berupa UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau sejenisnya yang memungkinkan persoalan alumni ini diurus secara lebih serius. Beberapa PT ternama sudah melakukan hal ini sejak lama. ITB, misalnya memiliki CDC (*Center Development Career*) sebagai wadah penyaluran dan pengembangan alumninya. Sayangnya tidak semua PT memiliki lembaga sejenis. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Dikti Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat (PKPPM) dengan membangun model-model kerjasama PT dengan *stakeholder* yang tertuang dalam *filot project* FKK (Forum Komunikasi dan Konsultasi) barangkali mengilhami dan menyadarkan kembali akan dharma keempat di atas. Keempat lembaga yang saat ini menjadi percontohan adalah Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Riau (UNRI), dan Universitas Bina Nusantara (UBINUS).

FKK, sebagaimana dirumuskan Direktorat PKPPM, Dikti (2003) bertujuan untuk a) meningkatkan komunikasi dan konsultasi antara stakeholder tentang aspek-aspek ketenagakerjaan dan pengembangan Iptek; b) menjadi jembatan antar-stekeholder dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia; c) meningkatkan *link and match* antara kebutuhan PT, industri, Pemda, dan masyarakat; d) mewadahi industri, Pemda, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di PT dalam memenuhi tuntutan industri dan masyarakat pengguna; f) meningkatkan kontribusi PT dalam efisiensi dan pengembangan industri, Pemda, dan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat; g) meningkatkan *network* antar-PT, industri, Pemda dan masyarakat dalam membantu pengembangan daerah (otonomi daerah); serta h) meningkatkan jiwa *entrepreneurship* di kalangan tenaga kerja intelektual.

Lembaga model ini diperlukan mengingat selama ini PT seperti melepas begitu saja para alumninya untuk bersaing secara mandiri dalam persaingan global, tanpa ada ikatan kembali dengan almamaternya. Kalaupun ikatan tersebut masih bersambung dengan adanya ikatan alumni (IKA) maka ketersambungan itu lebih bersifat seremonial atau personal saja. Lagi pula, IKA bukan merupakan lembaga struktural yang berada dalam birokrasi PT sehingga tidak bisa harapan mengembangkan alumni diserahkan sepenuhnya kepada IKA.

Membangun lembaga model yang ideal memerlukan energi yang besar dalam rentang waktu yang mungkin lama. Paling tidak untuk dapat membangun lembaga ini agar bisa menjadikan PT bersinergi dengan dunia usaha dan industri (DUDI) diperlukan beberapa prasyarat mendasar yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Pertama, kerap kali kelahiran lembaga atau unit dalam wadah PT hanya bersifat formalitas dan suplemen belaka. Kehadiran lembaga-lembaga sejenis hanya menjadi syarat minimal agar PT tersebut dikategorikan sebagai lembaga kredibel di mata masyarakat, yang pada kenyataannya tanpa kehadiran komitmen untuk benar-benar mengembangkan lembaga tersebut. Oleh karena itu, FKK hanya akan terbentuk dan berjalan secara baik apabila ada komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika untuk bersama-sama memikirkan alumni PT tersebut. Komitmen diperlukan mengingat dalam perjalannya lembaga ini tidak hanya hadir sebagai pelengkap institusi perguruan tinggi, melainkan menjadi motor dan sayap PT untuk mempromosikan dan memberdayakan potensi alumni PT tersebut.

Kedua, pada tingkat praksis diperlukan SDM yang bukan hanya mumpuni secara akademik, sebagaimana yang selalu dibanggakan selama ini, namun harus membangun lobi-lobi networking untuk kepentingan lembaga. Dunia usaha dan industri selama ini belum cukup yakin bahwa bergabung dalam wadah-wadah kerjasama seperti ini memberikan keuntungan bagi usahanya. Oleh karena itu, disamping potensi alumninya, lembaga ini harus juga menyediakan jasa-jasa lainnya, seperti *research by product*, yang berbasis teknologi baru bagi peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula jasa pelatihan SDM dan training-training motivasi hingga kini masih sangat diperlukan bagi peningkatan SDM perusahaan. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan inovasi baru dan manfaat langsung untuk pengembangan usahanya.\*\*\*

*Penulis adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung*